RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2025
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tarakan, Juli 2024

Kepala Dinas

A R B A I N, SE. M. AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19660616 199803 1 006

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL I

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun berjalan dan Capaian Renstra 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 30
2.4. Review terhadap Rancangan awal 50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 55

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 67

4.2 Pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 67

BAB V PENUTUP 75

Daftar Tabel

1. Tabel 1 Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023..... 13
2. Tabel 2 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat..... 27
3. Tabel 3 Review Terhadap Rencana Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025..... 33
4. Tabel 4 Daftar usulan (Aspirasi) Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat..... 52
5. Tabel 5 Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat..... 56
6. Tabel 6 Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026..... 58
7. Tabel 7 Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2025..... 68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam periode Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/Bappeda tanggal 06/01/2023 tentang Persiapan Penyusunan Ranwal RKPD Kota Tarakan Tahun 2024, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 2025.

Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM dan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

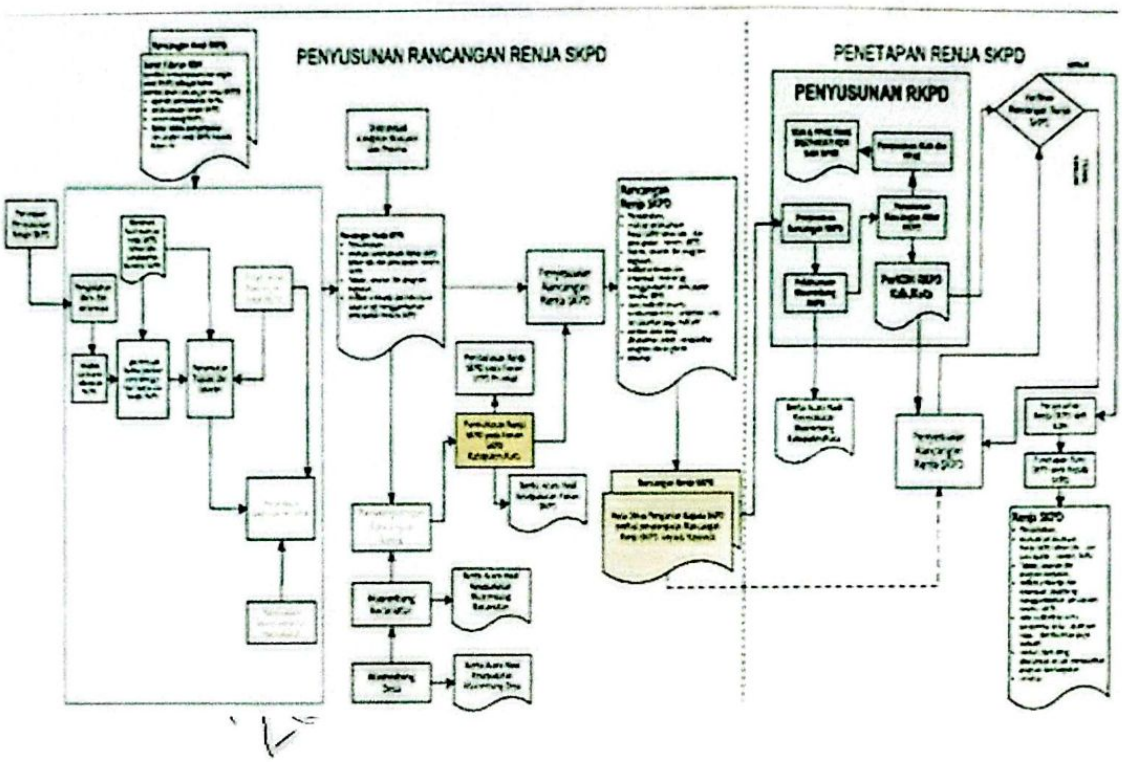

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu dua tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

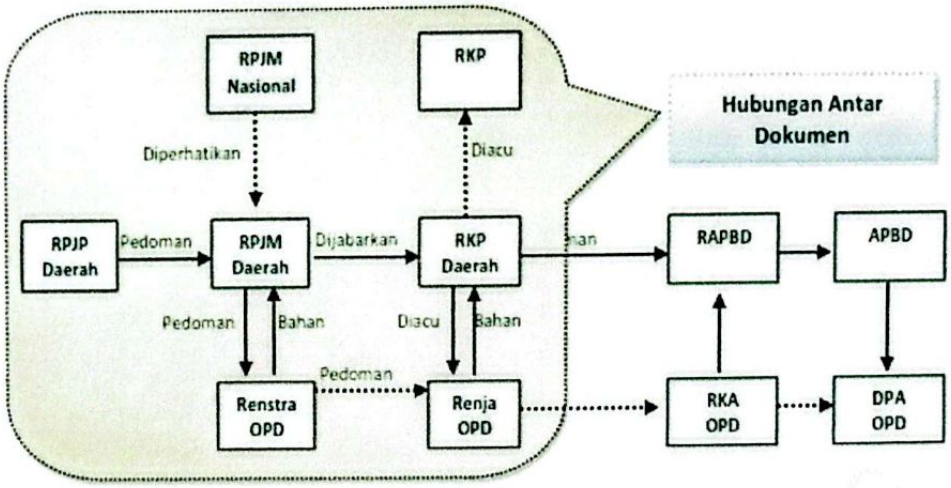

Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial;

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
27. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
30. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026
31. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 .

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah: :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis dua Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai Pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026.
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun

2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Bab ini memuat rancangan rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun berjalan (Tahun 2023), Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. **6.192.151.492**,- dengan perincian Rp. **6.079.276.525,-** untuk Belanja Operasional dengan realisasi sebesar Rp. **5.619.426.442** atau **92,44 %** dan Rp. **112.874.967**,- untuk Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. **111.391.000**,- atau **98.69%.**

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel 1** dibawah ini

Tabel 1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0-06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**95,97%**	**100%**	**99,85**	**99,85**	**100%**	**295,82%**	**295,82%**
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**100%**	**4 Layanan**	**12 Layanan**	**300 %**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan	26 Orang	360 Orang/bulan	312 Orang/bulan	86,67 %	312 Orang/bulan		

1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	8 Orang	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen		
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian**	**1 Layanan**	**-**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**100 %**	**-**	**8 Layanan**	**800 %**
1.06.01.2.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %	-	-	-
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**100%**	**5 Layanan**	**15 Layanan**	**300 %**
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	95 Item	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	593 Item	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket		
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.089 Lembar	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket		
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	11 Kali	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		
1.6.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah aset/BMD yang diadakan**	**6 Jenis**	**-**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**100%**	**6 Unit**	**12 Jenis**	**200 %**

1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	-	8 Unit	8 Unit	100%	6 Unit		
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**100%**	**5 Layanan**	**15 Layanan**	**300 %**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	180 Lembar	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan		
1.6.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
1.6.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset/BMD yang dipelihara**	**59 Unit**	**58 Unit**	**58 Unit**	**58 Unit**	**100%**	**58 Unit**	**174 Unit**	**300 %**
1.6.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	7 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit		
1.6.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit		
1.6.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	16 Unit		

1.6.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	-	-	-	2 Unit	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-	-	-	-	-
	RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200 %**	**200 %**
1.6.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.6.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.02.2.03.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial**	**-**	**-**	**35 Orang**	**35 Orang**	**100%**	**100 Orang**	**135 Orang**	**200 %**

1.6.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	35 Orang	35 Orang	100%	100 Orang	-	-
1-06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**88,28%**	**100%**	**79,00 %**	**79,00 %**	**100%**	**288,28%**	**288,28%**
1-06.04.2-01	**Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau**	**335 Orang**	**265 Orang**	**335 Orang**	**335 Orang cek Kembali jumlah penerim**	**100%**	**335 Orang**	**935 Orang**	**279,10%**
1.6.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang / Kali	200 Orang	84 Orang	42,00 %	200 Orang		
1.6.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	-	200 Orang	33 Orang	16,50 %	10 Orang		

1.6.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	17 Orang / Kali	41 Orang	41 Orang	100 %	50 Orang		
1.6.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	18 Orang / Kali	25 Orang	7 Orang	28,00 %	25 Orang		
1.6.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30 Orang / Kali	30 Orang	23 Orang	76,67 %	30 Orang		
1.6.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	30 Orang	30 Orang	100 %	30 Orang		
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	-	7 Orang	6 Orang	85,71 %	10 Orang		
1.6.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100 Persen**	**96,80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**296.80 %**	**296.80 %**
1.6.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	2.461 Layanan	2500 Orang	2.491 Orang	99,64 %	2500 Orang		

1-06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani**	**80%**	**82,39%**	**78%**	**94,29%**	**120,88%**	**80%**	**256,68%**	**320,85%**
1.6.05.2.02.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan**	**12550 KPM**	**12550 KPM**	**12550 KPM**	**12550 KPM**	**100%**	**12550 KPM**	**37650 KPM**	**300%**
1.6.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7181 Orang	10.351 KPM	10000 Orang	10000 Orang	100 %	10000 Orang		
1.6.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	3.073 KPM	7043 Keluarga	6135 Keluarga	87,11 %	3073 Keluarga		
1.6.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6967 Orang	9.460 KPM	9460 Orang	9059 Orang	95,76 %	9460 Orang		
1-06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial**	**100%**	**54,44%**	**100%**	**88,59%**	**88,59%**	**100%**	**254,44%**	**254,44%**
1.06.06.2.01.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah**	**100%**	**54,44%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**254,44%**	**254,44%**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	298 KK	298 Orang	264 Orang	88,59%	298 Orang		

1-06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan**	**100%**	**99,57%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**299,57%**	**299,57 %**
1.06.07.2.01.	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**1 TMP**	**1 TMP**	**1 TMP**	**1 TMP**	**100%**	**1 TMP**	**3 TMP**	**300%**
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	12 Bulan	1 Makam	1 Makam	100 %	1 Makam		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kategori kelurahan**	**Cepat Berkembang**		**Cepat Berkembang**	**Cepat Berkembang**	**100%**	**100%**		
2.13.4.2.01.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi**	**Jumlah Pembinaan Kelurahan**	**20 Kelurahan**	**20 Kelurahan**	**20 Kelurahan**	**20 Kelurahan**	**100%**	**20 Kelurahan**	**60 Kelurahan**	**300%**
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	4 Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen		

2-13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga masyarakat yang aktif**	**100%**	**98,72%**	**100%**	**98,41%**	**98,41%**	**100%**	**297,13%**	**297,13%**
2.13.05.2.01.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah**	**Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif**	**76 Lembaga**	**76 Lembaga**	**76 Lembaga**	**76 Lembaga**	**100%**	**76 Lembaga**	**228 Lembaga**	**300%**
2.13.5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	75 Lembaga	76 Lembaga	75 Lembaga	98,68%	76 Lembaga		

2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	10 Unit Sapras	20 Unit	10 Unit Sapras	50,00 %	25 Unit	45 Unit	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	7 Alat	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	10 Laporan	
2.13.5.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	25 Lembaga	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	28 Dokumen	56 Dokumen	

Hasil evaluasi tehadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase Partisipasi PSKS yang memperoleh Pembinaan, Bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial, yang mencapai 100 % dari target yang ditentukan yaitu 100% , hal ini disebabkan karena pelaksasanaan Sosialisasi terlaksana dengan baik, dengan dukungan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Realisasi 100%.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Rehabilitasi Sosial 79%. Dengan dukungan kegiatan :

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan permakan dan alat bantu serta Reunifikasi keluarga masih dalam proses tergantung pada laporan pihak terkait dengan dilakukannya data verifikasi dan validasi data terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
Bahwa dalam Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui program Sistem Layanan Rujukan Terpadu melalui pengaduan dan pendataan bagi PMKS diluar panti sebanyak 2.491 Orang.

Adapun Jenis layanan program di rehabilitasi sosial antara lain adalah :

(1). Penanganan anak terlantar dan adapsi.
(2). Pengiriman orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.

(3).Layanan rujukan penanganan lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar.

(4).Penyedian permakanan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantar, dan gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.

(5). Pelayanan data dan pengaduan.

(6). Penyediaan sandang untuk diserahkan kepada masyarakat.

(7). Pemberian layanan alat bantu kursi roda, alat bantu dengar, kaca mata kir, dan tongkat kruk ketiak.

(8). Pemberian layanan reunifikasi keluarga.Kegiatan program Rehabilitasi Sosial yaitu :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang sisabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial melalui penyedia permakanan, penyediaan alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

b. Penanganan rujukan lanjut usia terlantar, anak terlantar,

c. disabilitas terlantar ke Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Marga Rahayu Provinsi Kalimantan Utara, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA), dan RSUD dr. Jusuf SK

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 94,29 %, Dengan dukungan kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat data dilapangan dan laporan pihak terkait dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data terhadap fakir miskin dikota Tarakan.

Adapun jenis layanan yang diberikan terhadap perlindungan dan jaminan sosial, yaitu;

(1). Pemberian bantuan logistik penanganan bencana alam dan social masyarakat yang bersumber anggaran APBD dan Kementrian Sosial RI

(2). Memfasilitasi klien peserta BPJS mandiri menunggak/tidak mampu/sakit untuk menjadi peseta BPJS PBI Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Kegiatannya adalah sebagai berikut :

(1) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota, fasiitas bantuan Sosial kesejahteraan keluarga, dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

(2) Fasilitasi BPNT

(3) Fasilitasi PKH

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Adapun Capaian Realisasi Program Penangan Bencana sebesar 88,59 % Dengan dukungan kegiatan :

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial terhadap korban bencana alam dan sosial di Kota Tarakan dengan jumlah penyintas sebanyak 1440 orang dari jumlah penyintas sebanyak 1440 orang, bantuan yang diberikan berupa sandang, bantuan santunan bagi korban yang meninggal dunia diberikan uang tunai dengan anggaran dari kementerian Sosial berdasarkan hasil asesmen perugas TAGANA.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Adapun Capaian Realisasi Program Taman Makam Pahlawan sebesar 100% Dengan dukungan kegiatan :

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala yang mencapai realisasi sebesar 100%

Adapun jenis layanan yang diberikan terhadap pemberdayaan sosial, yaitu;

Yang tanda merah apa hubungannya dengan taman makan pahlawan

(5) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMP)

6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Adapun Capaian Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 100% Dengan dukungan kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dimana kegiatan ini dilaksanakan pada pada Tahun 2023. Kelurahan mana yanag mewakili provisi dan jika masuk tingkat nasional tambahkan keterangan

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar 98,41% hingga saat ini.

Dengan dukungan kegiatan :

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan; Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan, Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang telah terealisasi dan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adapun Capaian Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Dengan capaian Realisasi sebesar 100 %

Dengan dukungan kegiatan :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yg terealisasi sebesar 100,00%, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 100,00%

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya terealisasi sebesar 100,00%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar 100,00, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 100,00%, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar 100,00% dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 100,00%

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar 100,00%.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi sebesar 100,00% dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 100,00%;

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar 100,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 100,00% dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 100 %.

Dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Keterbatasan jumlah tenaga Sumber Daya manusia mengakibatkan petugas merangkap lebih dari satu program kegiatan.
2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia melalui diklat maupun workshop.
3. Keterbatasan angggaran program kegiatan urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadahi.
5. Ketersediaan data terkait bantuan sosial masih kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kementarian sosial, meskipun kota/kabupaten sudah mengupayakan pengusulan dan penghapusan data ke pemerintah pusat
6. Adanya Asumsi masyarakat bahwa kepengurusan bantuan Sosial dianggap ribet dengan prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan lama sehingga proses pengurusan cenderung masih melibatkan jasa pihak ketiga.
7. Pelayanan Masyarakat Kota Tarakan menggunakan layanan Online dengan menggunakan *whatsApp* akan tetapi tidak semua juga warga masyarakat mengerti untuk mengakses melalui online sebab masih ada masyarakat yang belum memiliki smartphone atau mereka yang belum familiar dengan pelayanan online, sehingga kami tetap melayani dan membantu mereka secara langsung.
8. Kegiatan program Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, belum ada peraturan/kebijakan pelaksanaan sebagai pedoman untuk menentukan Lembaga Adat.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN.

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Sosial dan Pemberayaan Masyarakat Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target.

Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan penangananan fakir miskin, rehabilitasi sosial serta data perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS di Kota Tarakan, sehingga menghambat kinerja aparatur dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	74,25	76	78	80	82	84	80,99	131,57	96,80	116,38	84	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Presentase pengelolaan TMP	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PSKS Yang Terlatih	41	41	46	50	65	75	-	-		100	100	
6	Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	100	100	100	100	100	100	-	75	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Tujuan dan sasaran Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarkat Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan
   a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
   b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
   c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kelemahan

a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang
   a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
   b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
   c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Ancaman
   a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
   b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
   c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;
   d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan,dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** dibawah ini

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RENJA 2025			analisa kebutuhan			Keterangan	OPD
1	2	3	4	5		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)		
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			**6.786.871.417**			**11.192.231.006**		
1.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.	6.	..			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.861.871.417**			**5.007.683.156**		**DinsosPM**
1.	**6.**	**01.**	**.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.137.549.932	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**4.359.816.946**		**DinsosPM**
1.	6.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3Dokumen	9.000.000		DinsosPM
1.	6.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	3 Dokumen	2.000.000,00	makan minum tim penyusunan renja dan Lkip dengan	DinsosPM

						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			perangkat daerah terkait, Koordinasi dan konsultasi ke kementerian pusat dan dinas Provinsi Kalimantan Utara	
1.	6.	01.	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.01.	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Dokumen	5.000.000,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.646.582.922	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.703.682.922		DinsosPM
1.	6.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3.584.422.922	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3.641.522.922,00		DinsosPM

1.	6.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.160.000,00		Dinsos PM
1.	6.	01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	18.200.000	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	18.200.000		Dinsos PM
1.	6.	01.	2.05.	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit			Dinsos PM
1.	6.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jumat)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	18.200.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	18.200.000,00		Dinsos PM
1.	6.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	185.000.000	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	189.469.014		Dinsos PM
1.	6.	01.	2.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.995,00		Dinsos PM
1.	6.	01.	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.399.573,00		Dinsos PM

1.	6.	01.	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.530.646,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000,00		
1.	6.	01.	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	65.538.800,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	6 Jenis	64.797.430	Jumlah aset/BMD yang diadakan	39 Jenis	226.497.430		DinsosPM
1.	6.	01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	64.797.430	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	226.497.430,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	103.700.000	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	103.700.000		DinsosPM
1.	6.	01.	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000,00		DinsosPM
1.	6.	01.	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000,00		DinsosPM

1.	6.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	109.269.580	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	109.267.580		Dinso sPM
1.	6.	01.	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.000.000,00		Dinso sPM
1.	6.	01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	86.359.580	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	86.359.580,00		Dinso sPM
1.	6.	01.	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19.910.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19.908.000,00		Dinso sPM
1.	6.	01.	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Dinso sPM
1.	**6.**	**02.**	**.**		**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	99.836.730	**Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan**	**100%**	**51.551.580,00**		**Dinso sPM**

						Kesejahteraan Sosial			**sosial**				
1.	6.	02.	2.02.		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 Izin	-	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 Izin	-		DinssPM
1.	6.	02.	2.02.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen			DinssPM
1.	6.	02.	2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	124 Orang	99.836.730	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	124 Orang	51.551.580,00		DinssPM
1.	6.	02.	2.03.	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	99.836.730	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	51.551.580,00		DinssPM
1.	**6.**	**04.**	**.**		**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang	100%	307.354.310	**Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan**	**100%**	**281.061.190,00**		**DinssPM**

						terpenuhi kebutuhan dasarnya			**pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**				
1.	6.	04.	2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang	277.544.310	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang	277.147.430,00		Dinso sPM
1.	6.	04.	2.01.	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.956.420	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.951.100,00		Dinso sPM
					Penyedian sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	10 orang	7.985.250	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	10 orang	**7.970.830,00**		
1.	6.	04.	2.01.	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot	44 Orang	117.500.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	44 Orang	117.500.000,00		Dinso sPM

						a Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota				
1.	6.	04.	2.01.	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	42.314.200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	41.994.840,00		DinsosPM
1.	6.	04.	2.01.	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	9.978.440	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	9.962.660,00	rutin	DinsosPM
1.	6.	04.	2.01.	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.810.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.780.000,00	belanja pakaian lapangan di ahlikan kepaket gizi anak data : disabilita .....nyusul tahun 2024 : 34 (kedarulutan), 41 Permakanan (data April, tahun 2023 :69	DinsosPM

1.	6.	04.	2.01.	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	10.000.000	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	9.988.000,00	10 orang yang diberikan layanan rujukan dan 4 petugas pendamping	DinsosPM
1.	6.	04.	2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	29.810.000	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	3.913.760,00		DinsosPM
1.	6.	04.	2.02.	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	29.810.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	3.913.760,00		DinsosPM
1.	**6.**	**05.**	**.**		**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	100%	141.184.545	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani**	**100%**	**141.129.540,00**		**DinsosPM**
1.	6.	05.	2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	141.184.545	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM	141.129.540,00		DinsosPM

1.	6.	05.	2.02.	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7181 Orang	71.199.585	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7181 Orang	71.199.580,00		DinsosPM
1.	6.	05.	2.02.	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	50.000.000	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	49.980.000,00		DinsosPM
1.	6.	05.	2.02.	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6967 Orang	19.984.960	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6967 Orang	19.949.960,00		DinsosPM
1.	6.	05.	3		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	1 Dokumen	-	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	1 Dokumen	-		DinsosPM
1.	6.	05.	3	01	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	1 Dokumen		Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	1 Dokumen			DinsosPM

1.	**6.**	**06.**	**.**		**Program Penanganan Bencana**	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	50.000.000	**Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial**	**100%**	**49.978.000,00**		**DinsosPM**
1.	6.	06.	2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	50.000.000	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	49.978.000,00		DinsosPM
1.	6.	06.	2.01.	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	50.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	49.978.000,00		DinsosPM
1.	**6.**	**07.**	**.**		**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	125.945.900	**Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan**	**100%**	**124.145.900,00**		**DinsosPM**
1.	6.	07.	2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	125.945.900	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	124.145.900,00		DinsosPM
1.	6.	07.	2.01.	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kot	1 Makam	125.945.900	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1 Makam	124.145.900,00		DinsosPM

						a			Kabupaten/Kota					
2.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.	13	...			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**1.925.000.000**			**6.184.547.850,00**		**DinsosPM**
2.	**13**	**.4.**	**.**		**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	100.000.000	**Kategori kelurahan**	**Cepat Berkembang**	**59.327.340,00**		**DinsosPM**
2.	13	.4.	2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	100.000.000	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	59.327.340,00		DinsosPM
2.	13	.4.	2.01.	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	59.327.340,00		DinsosPM
2.	**13**	**.5.**	**.**		**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	1.825.000.000	**Persentase lembaga masyarakat yang aktif**	**100%**	**6.125.220.510,00**		**DinsosPM**

2.	13	.5.	2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	1.825.000.000	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	6.125.220.510,00		DinssPM
2.	13	.5.	2.01.	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	500.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	486.641.890,00		DinssPM
2.	13	.5.	2.01.	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	10 Unit	75.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	10 Unit	4.435.000.000,00		DinssPM

					Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
2.	13	.5.	2.01.	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	36.000.100,00		DinsosPM
2.	13	.5.	2.01.	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	67.578.520,00		DinsosPM
2.	13	.5.	2.01.	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000,00		DinsosPM

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 4** dibawah ini :

Tabel 4
DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

No	Program Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu	Catatan
	Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
1	Posyandu sering banjir; 1 paket; Rp 150.000.000,-; P.5	Juata Kerikil		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
2	Posyandu Tidak Layak 1 Unit Rp200.000.000 Prioritas 4 Non Dana RT				Rp.200.000.000	Di akomodir
3	Posyandu tidak layak 1 Paket Rp.100.000.000	Selumit pantai		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir
4	Posyandu tidak layak menumpang di rumah warga untuk pembangunan 1 Paket Rp.100.000.000 prioritas 1	Selumit pantai		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir
5	Belum adanya WC dan Listrik di Posyandu Lansia " Aki Adu" Vol: 1 Posyandu Rp. 50.000.000 Prioritas 5 Non Dana RT	Karang Rejo		1 Posyandu	Rp.50.000.000	Di akomodir
6	Rehab/Pemeliharaan Posyandu (Prioritas 1 Non Dana RT) Panjang = 8 m Lebar = 6 m Rp150.000.000	Sebengkok		1 Posyandu	Rp.150.000.000	Di akomodir
7	Gedung tidak layak pakai / Volume : 1 unit Rencana biaya : Rp. 15.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Kampung Empat			Rp.15.000.000	Di akomodir
8	Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Lady Valentine) Rp 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Anyar		1 Posyandu	Rp.200.000.000	Di akomodir
9	Posyandu tidak layak menumpang di rumah warga untuk pembagunan	Selumit pantai		1 Paket	Rp.100.000.000	Di akomodir
10	BANGUNAN TELAH DIMAKAN USIA DAN KONDISI RUSAK PARAH 1 UNIT Rp250.000.000 Prioritas 4 Non Dana RT	Gunung Lingkas		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir

11	REHAB / PEMELIHARAAN POSYANDU " 1 UNIT	Skip		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
12	Posyandu tidak memiliki toilet, pintu ruang periksa dan jendela	Juata Kerikil		1 Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
13	Gedung tidak layak pakai / Volume : L: 6m P: 6m Rencana biaya : Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Kampung Empat		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
14	Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal (Seng dan WC Rusak) 1 Bangunan Rp. 50.000.000 DINSOSPM APBD Kota (Form 4 Prioritas 1 Non Dana RT)	Pantai Amal		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
15	Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal (Seng dan WC Rusak) 1 Bangunan Rp. 50.000.000 DINSOSPM APBD Kota (Form 4 Prioritas 1 Non Dana RT)	Pantai Amal		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir
16	Rehab/Pemeliharaan Posyandu Kerusakan Pasilitas/Atap Plafon Posyandu Citra 1 Bangunan Posyandu Rp100,000,000 Prioritas 1 Non Dana RT			1 Paket	Rp.100.000.000	Di akomodir
17	Posyandu Tidak Layak 1 paket Rp150.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Pemkot Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 1 Non Dana RT	Mamburungan		1 Paket	Rp.100.000.000	Di akomodir
18	Posyandu Tidak Layak 8 m x 6 m Rp150.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT	Karang Anyar Pantai		1 Paket	Rp.150.000.000	Di akomodir
19	Atap Rusak 1 paket Rp50.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT	Karang Anyar Pantai		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
20	REHAB POSYANDU LANSIA WELAS ASIH " 1 UNIT Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Skip		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
21	Rehab/Pemeliharaan Posyandu (Prioritas 2 Non Dana RT) 1	Sebengkok		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
22	Posyandu Tidak Layak 1 Bangunan Rp25.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 2 Non Dana RT	Mamburungan		1 Paket	Rp.25.000.000	Di akomodir
23	BANGUNAN POSYANDU PERLU DI REHAB 1 BANGUNAN Rp 200.000.000 PRIORITAS 3 NON DANA RT	Lingkas Ujung		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir

24	Perbaikan Posyandu Lestari/atap bocor dan rehab	Kampung Empat		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
25	Posyandu Rusak Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Anyar Pantai		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
26	Rehab bangunan posyandu 1 paket Rp150.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Hibah Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 5 Non Dana RT	Mamburungan		1 Paket	Rp.150.000.000	Di akomodir
27	Belum ada posyandu 1 unit Rp50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Anyar Pantai		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
28	Posyandu melati baru rusak dan miring 9M x 7M x 3M Rp.200.000.000	Karang Harapan		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir
29	Posyandu tidak layak 1 paket Rp.50.000.000	Karang Harapan		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
30	Plafon dan Dinding Posyandu rusak (Posyandu Kuda Laut) Vol : 1 Unit Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Rejo		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
31	Plafon dan Dinding Posyandu rusak Vol : 1 Unit Rp. 50.000.000 Prioritas 2 Non Dana RT	Karang Rejo		1Unit	Rp.50.000.000	Di akomodir
32	Bangunan posyandu sebagian rusak sehingga pelayanan tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Kenanga) Rp. 50.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Anyar		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
33	Posyandu rusak pelayanan warga tidak maksimal 1 Bangunan (Posyandu Wijaya Kusuma) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	karang anyar		1 Paket	Rp.200.000.000	Di akomodir
34	Posyandu Tidak Layak / Rencana Biaya : Rp. 50.000.000, Prioritas 1 Non dana RT	Kampung Empat		1 Paket	Rp.50.000.000	Di akomodir
35	POSYANDU PERLU DI REHAB 1 BANGUNAN Rp 200.000.000 PRIORITAS 2 NON DANA RT	Lingkas Ujung		1 Bangunan	Rp.200.000.000	Di akomodir
36	Posyandu belum selesai 1 Bangunan (Posyandu Bunga Lily) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	Karang Anyar		1 Bangunan	Rp.200.000.000	Di akomodir

37	Bangunan posyandu belum selesai 1 Bangunan (Posyandu Teratai) Rp. 200.000.000 Prioritas 1 Non Dana RT	karang anyar		1 Bangunan	Rp.200.000.000	Di akomodir
38	Posyandu Tidak Layak 1 Bangunan Rp50.000.000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat APBD Kota Hibah Form 4 Infrastruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi Prioritas 2 Non Dana RT	Mamburu ngan		1 Bangunan	Rp.50.000.000	Di akomodir
39	Pembangunan Posyandu			1 Bangunan	Rp.100.000.000	Usulan H. Hamka, S.E
40	Rehabilitasi			1 Bangunan	Rp.100.000.000	Usulan Mellyana Anggraeni, S.Pi
41	Pembangunan psoyandu Lingkungan	RT.1		1 Bangunan	Rp.100.000.000	Usulan Idoeliansyah Sabran
42	Rehab Pos Yandu Seruni 4				Rp.20.000.000	Usulan Maslan Abdul Latif
43	posyandu				Rp.100.000.000	Usulan Muhammad Yunus, S.H

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Renja Dinas Sosial dan Pamberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah daerah, oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pamberdayaan Masyarakat Tarakan Tahun 2025 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan kemiskinan , pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Prioritas Nasional. 8 (Delapan) Prioritas Nasional tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini

arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. 8 (Delapan) Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi.
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi.
4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Untuk mengawal keberhasilan prioritas nasional tersebut maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mengintegrasikan sasaran pembangunan nasional dengan Renja PD pada tahun 2025 sebagai berikut :

	Prioritas Nasional		Sasaran Pembangunan
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Indeks Demokrasi Indonesia
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Medorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1	Asia Power Index *(Military Capability)*
		2	Asia Power Index *(Diplomatic Influence)*
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
			Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
		4	Indeks Ketahanan Energi
		5	Kapasitas Tampungan Air (m^3/Kapita)
		6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

		12	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		14	Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif koperasi	1	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)
		2	Rasio Kewirausahaan (%)
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)
		5	Devisa Pariwisata (Miliar USD)
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
		7	Aset Perbankan / PDB (%)
		8	Aset Dana Pensiun / PDB (%)
		9	Aset Asuransi / PDB (%)
		10	Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)
		11	Total Kredit / PDB (%)
		12	Inklusi Keuangan (%)
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran : a) Rata-rata Nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains
			b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (Tahun)
			c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
		3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		4	Tingkat Penguasaan Iptek : a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b) Peringkat Indeks Inovasi Global
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan

		12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
		3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		4	Biaya Logistik (% PDB)
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif bagi Seluruh Penduduk (%)
		2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
		3	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)
		4	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)
		5	Persentase Desa Mandiri (%)
		6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	*Return on Asset* (ROA) BUMN (%)
		2	Indeks Integritas Nasional
		3	Indeks Materi Hukum
		4	Indeks Pelayanan Publik
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		6	Indeks Persepsi Korupsi
		7	Indeks Pembangunan Hukum
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
		9	Tingkat Inflasi (%)
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan

Pada Tahun 2025 dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat tercapai, yang memastikan semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan bagi perubahan,kemajuan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang didukung kualitas sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kondisi semakin tingginya pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 khususnya tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara maka prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
2. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas dan Jaminan Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak tambak di setiap Kabupaten/Kota.
4. Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota.
5. Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komperatif di setiap Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawaskan.
8. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial.
9. Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku Umkm di Setiap Kabupaten/Kota
10. Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada Semua Tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan serta Tenaga Honorer di Daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung TUJUAN DAN SASARAN dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS).
2. Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial.
3. Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-	
						2025	2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	Persentase menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial		100.00	100.00
			Meningkatnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan PSKS dalam kesejahteraan sosial		100.00	100.00
			Meningkatnya Sarana Pelestarian Nilai Kepahlawanan	Indeks kepuasan layanan taman makam pahlawan		Angka 75	Angka 75
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan		Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan		100.00	100.00
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai RB	Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP/Predikat	60.04/Baik	72.00/Baik	72.00/Baik

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada table 6 dibawah ini

Tabel 6
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Tahun 2026	
1	2	3	4	5			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)			(4)	(5)
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				**11,192,231,006**				**11,192,231,006**
1.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.	6.	..			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**5,007,683,156**				**5,007,683,156**
1.	**6.**	**01.**	**.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Tarakan**	**100%**	**4,359,816,946**	**APBD**		**100%**	**4,359,816,946**
1.	6.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Tarakan	3 Dokumen	9,000,000	APBD		3 Dokumen	9,000,000
1.	6.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	3 Dokumen	2,000,000.00	APBD		3 Dokumen	2,000,000.00
1.	6.	01.	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	3 Dokumen	2,000,000.00	APBD		3 Dokumen	2,000,000.00

1.	6.	01.	2.01.	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Tarakan	1 Dokumen	5,000,000.00	APBD		1 Dokumen	5,000,000.00
1.	6.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Tarakan	4 Layanan	3,703,682,922	APBD		4 Layanan	3,703,682,922
1.	6.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	312 Orang/Bulan	3,641,522,922.00	APBD		312 Orang/Bulan	3,641,522,922.00
1.	6.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	4 Dokumen	62,160,000.00	APBD		4 Dokumen	62,160,000.00
1.	6.	01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Tarakan	1 Layanan	18,200,000	APBD		1 Layanan	18,200,000
1.	6.	01.	2.05.	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 Unit		APBD		0 Unit	
1.	6.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jumat)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tarakan	26 Paket	18,200,000.00	APBD		26 Paket	18,200,000.00
1.	6.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Tarakan	5 Layanan	189,469,014	APBD		5 Layanan	189,469,014
1.	6.	01.	2.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tarakan	1 Paket	4,999,995.00	APBD		1 Paket	4,999,995.00
1.	6.	01.	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	77,399,573.00	APBD		2 Paket	77,399,573.00

1.	6.	01.	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	35,530,646.00	APBD		2 Paket	35,530,646.00
1.	6.	01.	2.06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	4 Laporan	6,000,000.00	APBD		4 Laporan	6,000,000.00
1.	6.	01.	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	20 Laporan	65,538,800.00	APBD		20 Laporan	65,538,800.00
1.	6.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Tarakan	39 Jenis	226,497,430	APBD		39 Jenis	226,497,430
1.	6.	01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarakan	39 Unit	226,497,430.00	APBD		39 Unit	226,497,430.00
1.	6.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Tarakan	5 Layanan	103,700,000	APBD		5 Layanan	103,700,000
1.	6.	01.	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	1 Laporan	1,800,000.00	APBD		1 Laporan	1,800,000.00
1.	6.	01.	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarakan	12 Laporan	101,900,000.00	APBD		12 Laporan	101,900,000.00
1.	6.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Tarakan	59 Unit	109,267,580	APBD		59 Unit	109,267,580
1.	6.	01.	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarakan	10 Unit	3,000,000.00	APBD		10 Unit	3,000,000.00
1.	6.	01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tarakan	8 Unit	86,359,580.00	APBD		8 Unit	86,359,580.00

1.	6.	01.	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tarakan	40 Unit	19,908,000.00	APBD		40 Unit	19,908,000.00
1.	6.	01.	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tarakan			APBD			
1.	**6.**	**02.**	**.**		**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial**	**Tarakan**	**100%**	**51,551,580.00**	**APBD**		**100%**	**51,551,580.00**
1.	6.	02.	2.02.		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	Tarakan	0 Izin	-	APBD		0 Izin	-
1.	6.	02.	2.02.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tarakan	0 Dokumen		APBD		0 Dokumen	
1.	6.	02.	2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Tarakan	124 Orang	51,551,580.00	APBD		124 Orang	51,551,580.00
1.	6.	02.	2.03.	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	124 Orang	51,551,580.00	APBD		124 Orang	51,551,580.00
1.	**6.**	**04.**	**.**		**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**Tarakan**	**100%**	**281,061,190.00**	**APBD**		**100%**	**281,061,190.00**

1.	6.	04.	2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	Tarakan	335 Orang	277,147,430.00	APBD		335 Orang	277,147,430.00
1.	6.	04.	2.01.	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	200 Orang	49,951,100.00	APBD		200 Orang	49,951,100.00
1.	6.	04.	2.01.	02	Penyedian sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	Tarakan	10 orang	**7,970,830.00**	**APBD**		10 orang	**7,970,830.00**
1.	6.	04.	2.01.	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	44 Orang	117,500,000.00	APBD		44 Orang	117,500,000.00
1.	6.	04.	2.01.	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	29 Orang	41,994,840.00	APBD		29 Orang	41,994,840.00
1.	6.	04.	2.01.	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	40 Orang	9,962,660.00	APBD		40 Orang	9,962,660.00
1.	6.	04.	2.01.	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	50 Orang	39,780,000.00	APBD		50 Orang	39,780,000.00
1.	6.	04.	2.01.	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	14 Orang	9,988,000.00	APBD		14 Orang	9,988,000.00

1.	6.	04.	2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tarakan	100 Persen	3,913,760.00	APBD		100 Persen	3,913,760.00
1.	6.	04.	2.02.	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	2500 Orang	3,913,760.00	APBD		2500 Orang	3,913,760.00
1.	**6.**	**05.**	**.**		**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani**	**Tarakan**	**100%**	**141,129,540.00**	**APBD**		**100%**	**141,129,540.00**
1.	6.	05.	2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	Tarakan	12550 KPM	141,129,540.00	APBD		12550 KPM	141,129,540.00
1.	6.	05.	2.02.	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Tarakan	7181 Orang	71,199,580.00	APBD		7181 Orang	71,199,580.00
1.	6.	05.	2.02.	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	3447 Keluarga	49,980,000.00	APBD		3447 Keluarga	49,980,000.00
1.	6.	05.	2.02.	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	6967 Orang	19,949,960.00	APBD		6967 Orang	19,949,960.00

1.	6.	05.	3		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	Tarakan	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
1.	6.	05.	3	01	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Tarakan	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
1.	**6.**	**06.**	**.**		**Program Penanganan Bencana**	**Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial**	**Tarakan**	**100%**	**49,978,000.00**	**APBD**		**100%**	**49,978,000.00**
1.	6.	06.	2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Tarakan	100%	49,978,000.00	APBD		100%	49,978,000.00
1.	6.	06.	2.01.	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	298 Orang	49,978,000.00	APBD		298 Orang	49,978,000.00
1.	**6.**	**07.**	**.**		**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan**	**Tarakan**	**100%**	**124,145,900.00**	**APBD**		**100%**	**124,145,900.00**
1.	6.	07.	2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Tarakan	1 TMP	124,145,900.00	APBD		1 TMP	124,145,900.00
1.	6.	07.	2.01.	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 Makam	124,145,900.00	APBD		1 Makam	124,145,900.00
2.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**Tarakan**			**APBD**			
2.	**13**	**...**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**Tarakan**		**6,184,547,850.00**	**APBD**			**6,184,547,850.00**

2.	**13**	**.4.**	**.**		**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kategori kelurahan**	**Tarakan**	**Cepat Berkembang**	**59,327,340.00**	**APBD**		**Cepat Berkembang**	**59,327,340.00**
2.	13	.4.	2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	Tarakan	20 Kelurahan	59,327,340.00	APBD		20 Kelurahan	59,327,340.00
2.	13	.4.	2.01.	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tarakan	1 Dokumen	59,327,340.00	APBD		1 Dokumen	59,327,340.00
2.	**13**	**.5.**	**.**		**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga masyarakat yang aktif**	**Tarakan**	**100%**	**6,125,220,510.00**	**APBD**		**100%**	**6,125,220,510.00**
2.	13	.5.	2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	Tarakan	76 Lembaga	6,125,220,510.00	APBD		76 Lembaga	6,125,220,510.00
2.	13	.5.	2.01.	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tarakan	76 Lembaga	486,641,890.00	APBD		76 Lembaga	486,641,890.00

2.	13	.5.	2.01.	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	10 Unit	4,435,000,000.00	APBD		10 Unit	4,435,000,000.00
2.	13	.5.	2.01.	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tarakan	1 Dokumen	36,000,100.00	APBD		1 Dokumen	36,000,100.00
2.	13	.5.	2.01.	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tarakan	1 Laporan	67,578,520.00	APBD		1 Laporan	67,578,520.00
2.	13	.5.	2.01.	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	25 Dokumen	1,100,000,000.00	APBD		25 Dokumen	1,100,000,000.00

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun

2025. Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu 16able16tor16 dan 16able16tor yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2025.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **TabeL 7** Sebagai berikut :

TABEL 7
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
		1	2	3	4	5			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(2)	(3)	(1)					(2)	(3)		(4)	(5)		
		1.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
		1.	6.	..			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**5,007,683,156**		**Sekretaris**
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Perangkat Daerah**	**1.**	**6.**	**01.**	**.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Tarakan**	**100%**	**4,359,816,946**	**APBD**	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Tarakan	3Dokumen	9,000,000	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	3 Dokumen	2,000,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	3 Dokumen	2,000,000.00	APBD	**Sekretaris**

		1.	6.	01.	2.01.	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Tarakan	1 Dokumen	5,000,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Tarakan	4 Layanan	3,703,682,922	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	312 Orang/ Bulan	3,641,522,922.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	4 Dokumen	62,160,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Tarakan	1 Layanan	18,200,000	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.05.	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 Unit		APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jumat)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tarakan	26 Paket	18,200,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Tarakan	5 Layanan	189,469,014	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tarakan	1 Paket	4,999,995.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	77,399,573.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tarakan	2 Paket	35,530,646.00	APBD	**Sekretaris**

		1.	6.	01.	2.06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	4 Laporan	6,000,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	20 Laporan	65,538,800.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Tarakan	39 Jenis	226,497,430	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tarakan	39 Unit	226,497,430.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Tarakan	5 Layana n	103,700,000	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.08.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	1 Laporan	1,800,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tarakan	12 Laporan	101,900,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Tarakan	59 Unit	109,267,580	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tarakan	10 Unit	3,000,000.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tarakan	8 Unit	86,359,580.00	APBD	**Sekretaris**
		1.	6.	01.	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tarakan	40 Unit	19,908,000.00	APBD	**Sekretaris**

		1.	6.	01.	2.09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tarakan			APBD	**Sekretaris**
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu	**Menurunnya angka Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin dan Tidak Mampu**	**1.**	**6.**	**02.**	**.**		**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial**	**Tarakan**	**100%**	**51,551,580.00**	**APBD**	**Bidang Sosial**
		1.	6.	02.	2.02.		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	Tarakan	0 Izin	-	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	02.	2.02.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tarakan	0 Dokumen		APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	02.	2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	Tarakan	124 Orang	51,551,580.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	02.	2.03.	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	124 Orang	51,551,580.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	**6.**	**04.**	**.**		**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan**	**Tarakan**	**100%**	**281,061,190.00**	**APBD**	Bidang Sosial

								dasarnya					
		1.	6.	04.	2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	Tarakan	335 Orang	277,147,430.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	04.	2.01.	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	200 Orang	49,951,100.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	04.	2.01.	02	Penyedian sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	Tarakan	10 orang	**7,970,830.00**	**APBD**	**Bidang Sosial**
		1.	6.	04.	2.01.	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	44 Orang	117,500,000.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	04.	2.01.	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	29 Orang	41,994,840.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	04.	2.01.	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	40 Orang	9,962,660.00	APBD	Bidang Sosial

		1.	6.	04.	2.01.	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	50 Orang	39,780,000.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	04.	2.01.	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	14 Orang	9,988,000.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	04.	2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tarakan	100 Persen	3,913,760.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	04.	2.02.	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	2500 Orang	3,913,760.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	**6.**	**05.**	**.**		**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani**	**Tarakan**	**100%**	**141,129,540.00**	**APBD**	**Bidang Sosial**
		1.	6.	05.	2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	Tarakan	12550 KPM	141,129,540.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	05.	2.02.	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Tarakan	7181 Orang	71,199,580.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	05.	2.02.	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	3447 Keluarga	49,980,000.00	APBD	Bidang Sosial

		1.	6.	05.	2.02.	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	6967 Orang	19,949,960.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	05.	3		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	Tarakan	1 Dokumen	-	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	05.	3	01	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Tarakan	1 Dokumen		APBD	**Bidang Sosial**
		1.	**6.**	**06.**	**.**		**Program Penanganan Bencana**	**Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial**	**Tarakan**	**100%**	**49,978,000.00**	**APBD**	Bidang Sosial
		1.	6.	06.	2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Tarakan	100%	49,978,000.00	APBD	**Bidang Sosial**
		1.	6.	06.	2.01.	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	298 Orang	49,978,000.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	**6.**	**07.**	**.**		**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan**	**Tarakan**	**100%**	**124,145,900.00**	**APBD**	**Bidang Sosial**
		1.	6.	07.	2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Tarakan	1 TMP	124,145,900.00	APBD	Bidang Sosial
		1.	6.	07.	2.01.	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman	Tarakan	1 Makam	124,145,900.00	APBD	**Bidang Sosial**

								Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					
		2.					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**Tarakan**			**APBD**	
		2.	13	...			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**Tarakan**		**6,184,547,850.00**	**APBD**	**Bidang PM**
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**	**2.**	**13**	**.4.**	**.**		**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kategori kelurahan**	**Tarakan**	**Cepat Berkembang**	**59,327,340.00**	**APBD**	**Bidang PM**
		2.	13	.4.	2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	Tarakan	20 Kelurahan	59,327,340.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	13	.4.	2.01.	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tarakan	1 Dokumen	59,327,340.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	**13**	**.5.**	**.**		**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga masyarakat yang aktif**	**Tarakan**	**100%**	**6,125,220,510.00**	**APBD**	**Bidang PM**
		2.	13	.5.	2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	Tarakan	76 Lembaga	6,125,220,510.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	13	.5.	2.01.	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Tarakan	76 Lembaga	486,641,890.00	APBD	**Bidang PM**

								Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					
		2.	13	.5.	2.01.	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	10 Unit	4,435,000,000.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	13	.5.	2.01.	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tarakan	1 Dokumen	36,000,100.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	13	.5.	2.01.	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tarakan	1 Laporan	67,578,520.00	APBD	**Bidang PM**
		2.	13	.5.	2.01.	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	25 Dokumen	1,100,000,000.00	APBD	**Bidang PM**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun
2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan MasyarakatKota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPD Tahun 2025 -2026.

Tarakan, Juli
Kepala,

A R B A I N, SE, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19660616 199803 1 006